

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas yang dijalankan. Pendapatan juga sebagai salah satu tolak ukur bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Manajemen tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi yang diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Menurut Sukirno (2000) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan pribadi adalah semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- b. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang disebut dengan pendapatan disposibel.
- c. Pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa produksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Pendapatan perseorangan (*Personal Income*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang

diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*transfer payment*). *Transfer payment* adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja). Rumusnya :

$$PI = NNI - (\text{Laba ditahan} + \text{Iuran asuransi} + \text{Iuran jaminan social} + \text{Pajak perseorangan})$$

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable income* ini diperoleh dari *personal income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Rumusnya :

$$DI = PI - \text{Pajak Langsung}$$

Menurut Sukirno (2000) metode perhitungan pendapatan nasional ada 3 jenis yaitu sebagai berikut

a. Pendekatan pengeluaran

Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian, sektor konsumen, perusahaan (investasi), pemerintah dan sektor perdagangan luar negeri. Atau dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran/belanja masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

Komponen – komponen penghitungan pendapatan dengan metode pengeluaran ini adalah :

1. Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods).

2. Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

Yang masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.

3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Investment Expenditure)

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Yang termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.

4. Ekspor Neto (Net Export)

Yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

b. Pendekatan Produksi

Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added)

masing-masing sektor. Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan $NT > 0$.

Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai *jasa* dan *barang jadi* (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi)

c. Pendekatan pendapatan

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kemampuan entrepreneur ialah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN).

Menghitung dengan pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

$$Y = r + w + i + p$$

- Y : Pendapatan Nasional (NI)
- r : sewa tanah/alam
- i : bunga modal
- w : upah TK
- p : laba pengusaha/skill

Perhitungannya disebut National Income (NI)

Sementara itu juga, para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yaitu:

1. Distribusi Pendapatan Perseorangan

Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan disini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tanpa mempehitungkan sumber pendapatan tersebut, baik dari segi imbalan yang berupa gaji dari pekerjaan, atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa, dll) juga di abaikan.

Individu diurutkan semua hanya berdasarkan pendapatan yang di terimanya, lantas membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran. Biasanya total populasi dibagi menjadi lima kelompok, kuintil (*quintiles*) atau sepuluh kolompok yang disebut desil (*decile*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan berapa proporsi yang di terima oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional total (Todaro, 2006: 234).

Terdapat beberapa ukuran untuk merefleksikan ketimpngan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio) dan Kurva Lorenz, ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

a. Koefisien Gini (Gini Ratio) & Kurva Lorenz

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah satu ukuran yang paling sering di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Metode perhitungan Indeks /Koefisien Gini digunakan Rumus: (Dajan, 2000: 106)

$$RG = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (Y_i^* + Y_{i-1}^*)$$

Dimana:

RG = Rasio Gini

k = Jumlah Kelas

f_i = % atau proporsi jumlah masyarakat dalam jumlah i

Y_i^* = atau proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan masyarakat sampai kelas ke i

Oshima (BPS, 2011: 5-6) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu di tentukan criteria sebaagai berikut:

- a) Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,38$
- b) Ketimpangan sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$
- c) Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

Koefisien Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi daari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase komulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertical. Ini menghasilkan Kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna.

Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada Gambar. Jika $A = 0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B = 0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk kedalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk.

c. Indeks Williamson

Indeks Williamson diperkenalkan oleh Jeffry G Williamson (1965), perhitungan nilai didasarkan pada *coefficient of variation* (CV) dan Williamson memodifikasi perhitungan ini dengan menimbanginya dengan proporsi penduduk wilayah. Berbeda dengan Koefisien Gini yang memerlukan data yang cukup spesifik seperti jumlah rumah tangga di tiap kelompok dalam suatu daerah di suatu negara, Indeks Williamson menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat melihat ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah dalam sebuah wilayah. Besar angka Indeks Williamson terletak antara 0 sampai 1, semakin besar angka Indeks Williamson maka semakin besar pula tingkat ketimpangan antar daerah yang terjadi (Tambunan 2003).

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan criteria seperti berikut: (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012:III-16)

1. Jika proporsi pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
2. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/ menengah;
3. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

2. Distribusi Fungsional

Distribusi Fungsional atau distribusi bagian factor yang mencoba menjelaskan bagian dari total pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing factor produksi. Teori dan ukuran mengenai distribusi pendapatan fungsional hendak mempertanyakan persentase pendapatan yang akan diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dan perbandingannya dengan persentase dari total pendapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan keuntungan (yaitu hasil dari pengolahan atau penyewa tanah, pendayagunaan modal fisik dan financial).

Kurva-kurva penawaran dan permintaan diandaikan akan menentukan harga unit dari masing-masing faktor produksi itu. Kalau harga unit-unit itu dikalikan dengan jumlah faktor tertentu yang digunakan atas dasar pertimbangan efisiensi

pemanfaatan faktor produksi (yaitu pertimbangan mengenai biaya minimum), maka orang akan menerima suatu ukuran mengenai total pembayaran untuk masing-masing faktor (Todaro, 1995:213-214).

2.1.2 Faktor pendapatan Masyarakat.

Pada usaha ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang akan diterima oleh masyarakat. Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pendapatan adalah

a. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

b. Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

c. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

d. Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi

kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh. (Ratna Sukmayani, 2008)

2.1.3 Konsep Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa / Kelurahan setempat.

Usaha perekonomian Desa / Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan untuk masyarakat Desa /

Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif). Tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa /Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
- d. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) meliputi:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif.
2. Menerima Pinjaman uang dari masyarakat Desa/Kelurahan sebagai anggota UED-SP.
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UEDSP dalam kaitan kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Jenis kegiatan UED-SP pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah provinsi Riau untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan infrastruktur (K2I). Perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui bidang sektoral akan dituangkan dalam bentuk rencana jangka menengah (RJM) dan rencana pembangunan tahunan desa/kelurahan (RPTD/K).

a. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama 5 tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infrastruktur yang dihasilkan dari pengagalian potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Yang memuat: kondisi umum desa/kelurahan (potensi dan masalah), visi dan misi, rencana pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan untuk waktu 5 tahun yang akan datang.

b. Rencana pembangunan tahunan desa/kelurahan (RPTD/K)

Merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas dan berskinambungan untuk 1 tahun anggaran, penyusunan dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi, dan kebutuhan ditingkat kelompok, RT, dusun, dan desa, dengan melibatkan segenap unsure masyarakat.

Pengelolaan dana usaha desa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar UED yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat,

termasuk dalam halusulan, pemilihan pengelola. sistem pengelolaan dan penyaluran dana. Setiap pelaksanaan dana usaha desa/kelurahan, harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka, melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya antara lain:

1. Swadaya

Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan, sebagai indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut.

2. Pelestarian Kegiatan

Dana usaha desa/kelurahan merupakan tanggung jawab masyarakat, melalui pengurus yang terbentuk, kegiatan ekonomi yang telah tercipta dan mempunyai pangsa pasar perlu terus dikembangkan dengan bantuan pembinaan manajemen dari instansi terkait.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai UED-SP adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Tahun peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Siti Fatimah (2012)	Analisis Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonom Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu	Dari hasil analisis diperoleh bahwa terjadi penunggakan pada UED-SP Maju Bersama sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 3.000.000,-. Persentase penunggakan oleh nasabah yang tertinggi adalah nasabah pada usaha perkebunan yaitu 81.9%, hal ini

			<p>disebabkan harga produk perkebunan saat ini sangat rendah sehingga nasabah mengalami permasalahan keuangan dan tidak mampu membayar angsuran kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penunggakan tetap terjadi meski sistem pemberian kredit telah diterapkan dengan baik. Namun demikian permasalahan kredit macet dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip 5 C.</p>
2.	Kartika Sary (2013)	Implementasi Program Usaha Ekonomi Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	<p>Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan program pemberdayaan desa melalui program usaha ekonomi desa di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berjalan baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan rencana tahunan dan rencana jangka menengah, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban.</p>

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian ini adalah :

“Diduga terdapat pengaruhUED-SP terhadap pendapatan masyarakat di Desa Kualu Nenas”.

2.4 Operasional Variabel

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai judul penelitian, maka penulis menyusun konsep operasinal sebagai berikut :

- a. Variabel Y (Peningkatan Pendapatan)
- b. Variabel X (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam)